

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan mengkaji tentang fenomena yang ada di lokasi penelitian. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan mengambil objek penelitian tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Wilayah Kabupaten Cirebon terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Dalam meningkatkan pembangunan dan ekonominya, Kabupaten Cirebon bersama dengan Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Indramayu membentuk suatu kerjasama antar kabupaten yang disebut dengan Wilayah Tiga Cirebon atau disebut juga wilayah CIAYUMAJAKUNING.

2.1.1. Keadaan Geografis

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur dan merupakan batas, sekaligus pintu gerbang Provinsi Jawa Tengah. Dalam sektor pertanian Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah produsen beras yang terletak di jalur pantura.

Letak daratannya memanjang dari Barat Laut ke Tenggara, dilihat dari permukaan tanah/daratannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama daerah dataran rendah umumnya terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, yaitu pada Kecamatan Gegesik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan,

Gunungjati, Tengah Tani, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok, dan Kecamatan Pabedilan. Sedangkan sebagian lagi termasuk pada daerah dataran tinggi yaitu pada Kecamatan Pasaleman, Karang Wareng, Lemah Abang, Susukan Lebak, Sedong, Beber, Greged, Talun, Sumber, Dukupuntang, dan Susukan.

1.1.2. Batas Wilayah

Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 108⁰48' Bujur Timur dan 6⁰30'-7⁰00' Lintang Selatan, yang dibatasi oleh :

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

Kondisi Topografi wilayah kecamatan yang terletak di sepanjang jalur pantura termasuk pada dataran rendah yang memiliki letak ketinggian antara 0-10 m dari permukaan air laut, sedangkan wilayah kecamatan yang terletak di bagian selatan memiliki letak ketinggian antara 11 – 130 m dari permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Cirebon secara administrasi terbagi menjadi 40 kecamatan, 12 kelurahan, dan 412 desa. Berikut merupakan tabel uraian luas wilayah dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Cirebon :

Tabel 2. 1
Nama-Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Ibukota Kecamatan (Km2)

No.	Kecamatan	Ibukota kecamatan	Luas wilayah (Km²)
1	2	3	4
1	Waled	Waled kota	30,79
2	Pasaleman	Pasaleman	41,31
3	Ciledug	Ciledug Kulon	14,63
4	Pabuaran	Pabuaran Lor	9,57
5	Losari	Panggangsari	45,32
6	Pabedilan	Pabedilan Kidul	25,82
7	Babakan	Babakan Gebang	22,18
8	Gebang	Gebang	35,36
9	Karangsembung	Karangsuwung	18,82
10	Karangwareng	Kubangdeleg	27,19
11	Lemahabang	Lemahabang	22,65
12	Susukan Lebak	Susukan Agung	18,05
13	Sedong	Panongan	34,43
14	Astanajapura	Buntet	28,91
15	Pangenan	Pangenan	35,73
16	Mundu	Luwung	27,40
17	Beber	Halimpu	25,75
18	Greged	Nanggela	32,22
19	Talun	Kecomberan	19,31
20	Sumber	Sumber	29,54
21	Dukupuntang	Dukupuntang	37,44
22	Palimanan	Palimanan Timur	19,12
23	Plumbon	Plumbon	19,03
24	Depok	Depok	16,38
25	Weru	Setu Kulon	9,11
26	Plered	Kaliwulu	13,23

27	Tengah Tani	Dawuan	9,76
1	2	3	4
28	Kedawung	Kalikoa	11,25
29	Gunungjati	Klayan	22,45
30	Kapetakan	Kapetakan	67,04
31	Suranenggala	Karangreja	25,73
32	Klangenan	Jemaras Kidul	20,42
33	Jamblang	Wangunharja	16,59
34	Arjawinangun	Jungjang	24,29
35	Panguragan	Panguragan Kulon	22,00
36	Ciwaringin	Ciwaringin	16,10
37	Gempol	Gempol	30,72
38	Susukan	Bojong Kulon	52,05
39	Gegesik	Gegesik Lor	63,83
40	Kaliwedi	Kaliwedi Kidul	28,77
Kabupaten Cirebon :			1.070,29

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon 2020

Dari tabel tersebut diatas kecamatan dengan wilayah terluas yaitu Kecamatan Gegesik dan Kecamatan Kapetakan dengan masing-masing luas wilayah seluas 63,83 Km² dan 67,04 Km² sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Weru dengan luas wilayah 9,11 Km²

1.1.3. Keadaan Demografi

Kabupaten Cirebon adalah salah satu di antara kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai jumlah penduduk cukup besar. Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.189.785 jiwa dan dengan luas wilayah administratif 1.070,29 Km² maka rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Cirebon adalah sebesar 2.045 jiwa per Km², dari total

penduduk sebanyak 2.189.785 jiwa, 1.081.272 jiwa diantaranya adalah perempuan sehingga *sex rasionya* adalah 102,52.

Persebaran penduduk Kabupaten Cirebon per kecamatan hingga pada tahun 2020 masih menunjukkan kondisi kurang merata seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sumber yaitu sebanyak 90.891 jiwa dengan sebaran/distribusi penduduknya sebesar 4,15 % dan yang terkecil adalah Kecamatan Pasaleman dengan jumlah penduduk hanya 26.886 jiwa dengan sebaran penduduk sebesar 1,23%.

Kepadatan penduduk di masing-masing Kecamatan juga menunjukkan ketidakmerataan. Hal ini disebabkan kondisi dan potensi masing-masing wilayah kecamatan yang tidak sama, semakin padatnya penduduk cenderung di pusat kota kecamatan dan daerah perkotaan karena banyak terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai bidang usaha yang dapat memberikan lapangan pekerjaan.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon dibagi berdasarkan 17 sektor lapangan usaha yaitu: Pertanian/Kehutanan/Perikanan, Pertambangan dan Penggalan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, Pengadaan Air, pengelolaan sampah/limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan/pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan pembagian pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah/wilayah dan mengupayakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi yang semula dari sektor primer, yaitu sektor yang bergantung pada jenis lapangan usaha pertanian serta pertambangan dan penggalian kepada sektor sekunder (lapangan usaha industri pengolahan; listrik, gas, dan air minum; konstruksi/bangunan) serta sektor tersier (lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran; angkutan dan komunikasi; bank/lembaga keuangan, perusahaan persewaan, jasa pemerintahan dan jasa swasta).

Angka-angka yang disajikan secara sektoral memperlihatkan tentang struktur perekonomian suatu daerah, apakah menunjukan kearah daerah yang agraris atau industri. Berdasarkan data dari masing-masing sektor dapat dilihat peranan atau sumbangan tiap sektor terhadap jumlah pendapatan secara keseluruhan.

Tabel 2. 2
PDRB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020 s/d 2022

No	Sektor PDRB	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.893,61	7.952,74	8.822,41
2	Pertambangan dan Penggalian	526,24	587,31	609,10
3	Industri Pengolahan	10.186,65	10.811,65	11.665,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	95,23	108,67	110,76

1	2	3	4	5
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	55,23	60,57	63,69
6	Konstruksi	5.413,44	5.955,52	6.328,78
7	Perdagangan Besar dan Eceran	7.175,42	7.735,18	8.047,95
8	Transportasi dan Pergudangan	4.110,76	4.256,39	4.992,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.567,29	1.600,25	1.841,55
10	Informasi dan Komunikasi	1.465,53	1.446,34	1.512,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.934,56	2.130,03	2.353,65
12	<i>Real Estate</i>	1.184,60	1.298,40	1.381,20
13	Jasa Perusahaan	415,16	451,74	516,88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.491,69	1.610,24	1.552,18
15	Jasa Pendidikan	3.215,27	3.352,61	3.513,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.020,92	1.120,75	1.179,98
17	Jasa lainnya	1.809,98	1.831,56	2.161,76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		49.561,56	52.309,94	56.653,64

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon

Kontribusi sektor usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di Kabupaten Cirebon, dari 17 sektor usaha diatas, yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Cirebon yaitu dari sektor Industri Pengolahan sebesar 20,59 % , hal ini didukung dengan letak geografis Kabupaten Cirebon yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan gerbang masuk Provinsi Jawa Barat serta didukung dengan akses *Tax On Location* (TOL) yang terpusat di Kabupaten Cirebon menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai jalur perdagangan sehingga sangat dimungkinkan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan *central* industri pengolahan di Jawa Barat. Sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang berkontribusi sebesar 0,11 %.

Tabel 2. 3
PDRB Menurut Lapangan Usaha (Miliyar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2020 s/d 2022

No	Sektor PDRB	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.563,11	4.559,21	4.741,55
2	Pertambangan dan Penggalian	417,12	445,47	445,26
3	Industri Pengolahan	6.809,81	6.984,48	7.312,38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	54,01	61,28	62,24
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,19	36,17	37,06
6	Konstruksi	3.869,18	4.018,35	4.017,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran	4.874,19	5.036,25	5.151,91
8	Transportasi dan Pergudangan	2.574,72	2.585,90	2.834,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.107,58	1.095,73	1.179,80
10	Informasi dan Komunikasi	1.440,25	1.510,60	1.602,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.303,60	1.365,38	1.376,98
12	<i>Real Estate</i>	858,27	938,10	982,82
13	Jasa Perusahaan	288,51	311,93	343,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	862,30	854,35	834,58
15	Jasa Pendidikan	2.100,66	2.102,32	2.164,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	786,74	844,74	887,38
17	Jasa lainnya	1.360,82	1.377,24	1.550,66
Produk Domestik Regional Bruto		33.304,05	34.127,52	35.523,78

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon

2.2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Cirebon

DISKOMINFO merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, DISKOMINFO termasuk dalam kategori dinas di bidang teknis yang membantu

Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan aplikasi di bidang komunikasi dan informatika.

DISKOMINFO kabupaten Cirebon merupakan salah satu dinas yang memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon, yaitu salah satunya dengan kebijakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, hal ini semakin meningkatkan eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, karena prestasi ini telah mampu meningkatkan pendapatan Kabupaten Cirebon. Adapun visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah :

Visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada dasarnya tidak terlepas dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Cirebon, Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”**. Penetapan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon disamping harus berlandaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon tentunya harus juga berlandaskan tugas pokok yang diemban, yaitu : membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, dalam kurun waktu 2019-2024. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

Berdasarkan uraian tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah mengantisipasi dengan menetapkan visi sebagai berikut : **“Mewujudkan Diskominfo sebagai pusat komunikasi dan informatika”**.

Visi tersebut dijabarkan dalam empat misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang memadai;
2. Meningkatkan pelayanan informasi dan telekomunikasi;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait dan media masa.

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Adapun untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. Pengelolaan aplikasi informatika;
- d. Pengelolaan statistik sektoral;
- e. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Teknologi dan Informatika, membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government*, membawahi:
 - a. Seksi Statistik;
 - b. Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government*, dengan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government*;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government*;
- c. Penyelenggaraan statistik sektoral;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan layanan teknologi informasi;
- e. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- f. Pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan atau nir-sangkal), pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan informasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- g. Pelayanan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *smart city*;
- i. Pelaksanaan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah;
- j. Penyelenggaraan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
- k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government*; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government* antara lain:

1. Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian

Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government*. Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan aplikasi keamanan dan persandian. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi keamanan dan persandian;
- c. Pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintah dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- d. Pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- e. Pelaksanaan layanan sistem informasi interaktif pemerintah dan masyarakat;
- f. Pelaksanaan penetapan dan pengelolaan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat serta pelayanan penetapan tata kelola nama domain, sub domain pemerintah daerah;
- g. Pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi;
- h. Pelayanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;

- i. Pelaksanaan audit aplikasi keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah;
- j. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- k. Pelaksanaan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- l. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;
- m. Penyelenggaraan program-program peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- n. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- o. Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras serta perencanaan kebutuhan unsur pengelola dan pengguna persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- p. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Cirebon;
- q. Pelaksanaan pengamanan kegiatan /aset/fasilitas/instansi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- r. Pelaksanaan pengelolaan *scurity Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;

- s. Pelaksanaan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- t. Penyusunan instrumen dan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan komunikasi sandi;
- u. Perencanaan pengamanan informasi elektronik dan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah Daerah;
- v. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi;
- w. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian; dan
- x. Pelaksanaan statistik, persandian dan *e-government* yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

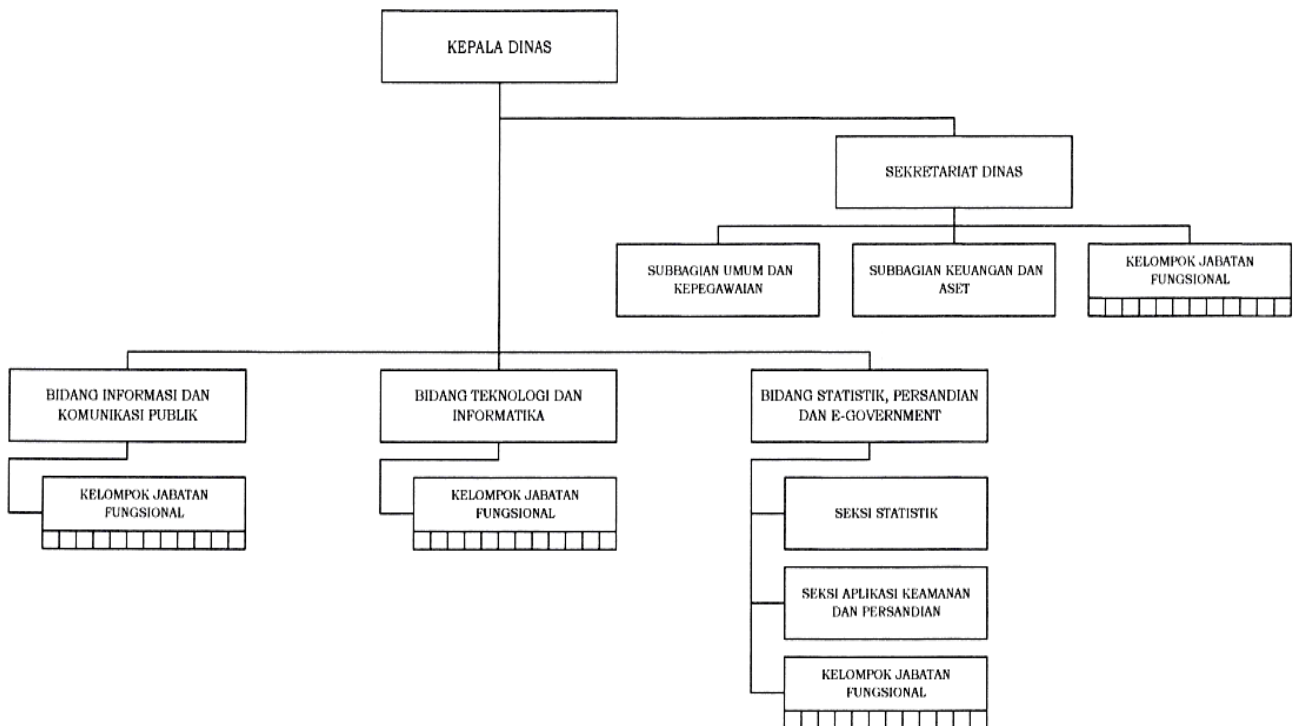
2. Seksi Statistik

Seksi Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi Statistik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government*. Seksi Statistik mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan statistik sektoral daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Statistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Statistik;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik;
- c. Pengekoordinasian dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;

- d. Peningkatan kapasitas SDM dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
- e. Pembangunan metadata statistik sektoral;
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- g. Pengembangan infrastruktur data statistik;
- h. Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah;
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang statistik, Persandian dan *E-Government* yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi DISKOMINFO Kabupaten Cirebon



2.2.2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai DISKOMINFO

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa total jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2023 berjumlah 25 orang pegawai termasuk pimpinan dan pejabat lainnya, serta dibantu oleh 34 orang pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Jumlah tersebut menggambarkan bahwa jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) lebih banyak dibandingkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada, hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi PNS dan pejabat di Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan sebaik mungkin walaupun banyak dibantu oleh pegawai TKK namun kewenangan TKK sangat terbatas dan status kepegawaian mereka yang masih belum kuat secara hukum di Indonesia, berbeda dengan PNS yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam upaya mencapai keberhasilan serta dalam rangka meningkatkan kinerja dinas sangat diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memiliki kompetensi khususnya di bidang teknologi informasi, baik di tingkat pengguna, pengelola maupun pimpinan namun keterbatasan SDM merupakan salah satu penyebab pengembangan *e-government* menjadi kurang terarah dengan baik. Sementara itu untuk menjamin keberlangsungan sinergitas implementasi sistem informasi dan telematika, diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksanaan sistem bidang teknologi informasi. Berdasarkan hasil pemetaan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Rekapitulasi Pegawai per Golongan

No	Pangkat	Jumlah
1	2	3
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	18
3	Golongan II	5
4	Golongan I	-
5	Tenaga Kerja Kontrak	34

Sumber : DISKOMINFO KAB. Cirebon

2.2.3. Rekapitulasi Lokasi Menara Telekomunikasi

Perkembangan dunia digital yang semakin pesat membuat industri pertelekomunikasian ikut berkembang, hal ini dapat dilihat dari jumlah menara yang setiap tahunnya semakin meningkat. Saat ini jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon berjumlah 568 yang tersebar di 40 Kecamatan antara lain sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Rekapitulasi Jumlah Menara Telekomunikasi Per Kecamatan Kabupaten Cirebon

No.	Lokasi	Jumlah menara	Letak Zona
1	2	4	Zona I (Pusat Kota)
1	Kecamatan Sumber	26	
2	Kecamatan Depok	16	
3	Kecamatan Dukupuntang	16	
4	Kecamatan Plered	10	
5	Kecamatan Plumbon	27	
6	Kecamatan Tengah Tani	13	
7	Kecamatan Kedawung	25	
8	Kecamatan Weru	19	
9	Kecamatan Talun	25	
10	Kecamatan Astanajapura	20	

11	Kecamatan Ciwaringin	14	Zona II (Pinggiran Kota)
12	Kecamatan Gempol	12	
13	Kecamatan Beber	13	
14	Kecamatan Lemahabang	13	
15	Kecamatan Klangeran	11	
16	Kecamatan Jamblang	10	
17	Kecamatan Sedong	7	
18	Kecamatan Mundu	21	
19	Kecamatan Palimanan	18	
20	Kecamatan Waled	12	Zona III (Jauh dari Pusat Kota)
21	Kecamatan Pasaleman	6	
22	Kecamatan Ciledug	13	
23	Kecamatan Pabuaran	7	
1	2	3	4
24	Kecamatan Losari	11	
25	Kecamatan Pabedilan	12	
26	Kecamatan Babakan	14	
27	Kecamatan Gebang	18	
28	Kecamatan Karangsembung	9	
29	Kecamatan Karangwareng	3	
30	Kecamatan Kaliwedi	12	
31	Kecamatan Susukan Lebak	5	
32	Kecamatan Arjawinangun	20	
33	Kecamatan Panguragan	10	
34	Kecamatan Pangenan	15	
35	Kecamatan Susukan	21	
36	Kecamatan Gegesik	11	
37	Kecamatan Grege	9	
38	Kecamatan Gunungjati	24	
39	Kecamatan Kapetakan	14	
40	Kecamatan Suranenggala	6	
Jumlah		568	

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon

Berdasarkan tabel letak lokasi menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon dapat dilihat bahwa jumlah titik lokasi menara terbanyak berada di Kecamatan Sumber yang merupakan pusat ibu kota sekaligus pusat pemerintahan di Kabupaten Cirebon. Kecamatan Sumber sendiri masuk kedalam wilayah zona

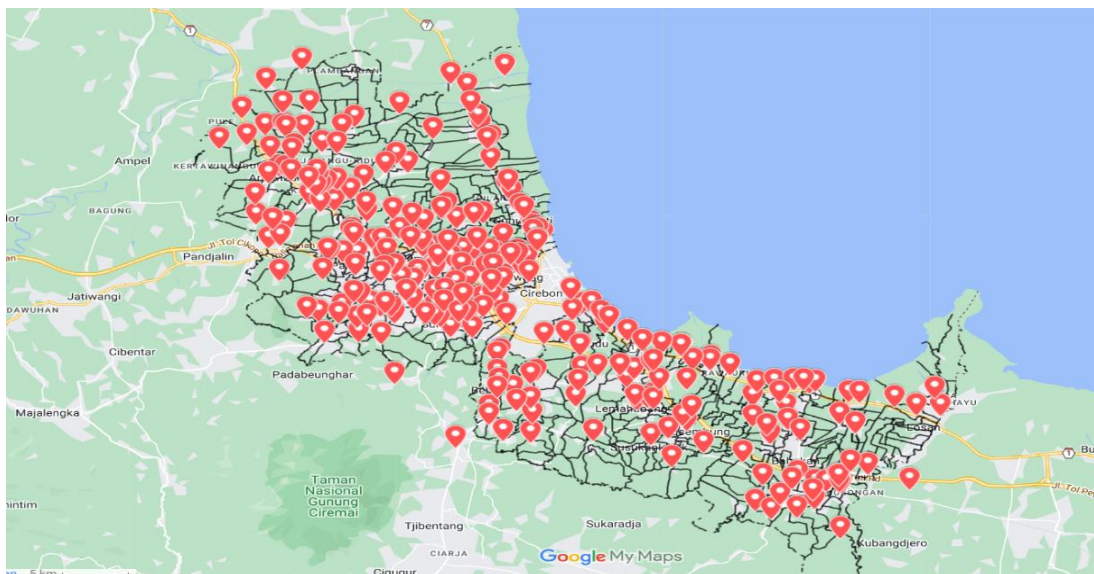
satu yang artinya berada di pusat kota, adapun berikut ini adalah pembagian lokasi menara berdasarkan zonasi antara lain :

Tabel 2. 6
Letak Koordinat Menara Telekomunikasi Kabupaten Cirebon

No.	Lokasi Menara	Jumlah	%
1	Zona I (Pusat Kota)	177	32%
2	Zona II (Pinggiran Kota)	139	24%
3	Zona III (Jauh dari Pusat Kota)	252	44%
Jumlah		568	100%

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon

Gambar 2. 2
Peta Lokasi Menara di Kabupaten Cirebon



Sumber : Diskominfo kabupaten Cirebon

2.3. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan suatu tempat bagi peneliti untuk dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk mengumpulkan data dan informasi secara akurat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada gambaran umum dan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, maka

penetapan situs penelitian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Adapun beberapa data yang diperoleh dari situs penelitian terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yaitu perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Cirebon selama periode waktu 2018 – 2021.

1.5.1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon

Tabel 2. 7
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Cirebon (Juta Rupiah)
Tahun 2018-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2018	569.157.006.675,00	584.810.843.481,60	102,75
2019	698.106.706.331,00	727.789.823.861,38	104,25
2020	657.674.640.302,00	733.241.269.372,02	111,49
2021	732.574.975.240,00	846.456.257.038,54	115,54

Sumber: Dispenda Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Cirebon tahun 2018 sampai dengan 2021, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 584.810.843.481,60 dari yang ditargetkan Rp. 569.157.006.675,00 di tahun 2019 jumlah penerimaan PAD meningkat dan mencapai target, yaitu Rp. 727.789.823.861,38 dari target Rp. 698.106.706.331,00 begitu juga pendapatan yang diterima di tahun 2020 meningkat dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 733.241.269.372,02 dari yang ditargetkan sebesar Rp.

657.674.640.302,00 dan 2021 sebesar Rp. 846.456.257.038,54 dari yang di targetkan sebesar Rp. 732.574.975.240,00.

1.5.2. Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon

Tabel 2. 8
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon (Juta Rupiah)
Tahun 2018 - 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2018	46.117.974.350,00	42.630.642.182,00	92,44
2019	260.777.174.153,00	278.529.344.125,19	106,81
2020	244.181.321.476,00	270.376.841.766,01	110,73
2021	265.011.926.240,00	307.683.647.484,27	116,11

Sumber: Dispenda Kabupaten Cirebon

Perkembangan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar dalam memberi kontribusi terhadap pemasukan PAD. Penggolongan retribusi daerah di Kabupaten Cirebon terdiri dari : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum itu sendiri terdiri dari tujuh objek retribusi, retribusi jasa usaha terdiri dari tujuh objek retribusi, dan retribusi perizinan tertentu terdiri dari enam objek retribusi yang diantaranya meliputi objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang bertujuan untuk melakukan pengendalian menara dengan mengutamakan aspek keamanan, tata ruang dan kepentingan umum.

Adapun perkembangan retribusi di Kabupaten Cirebon dari tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami pasang surut, pada tahun 2018 penerimaannya turun dari target, yaitu sebesar Rp. 42.630.642.182,00 dari yang ditargetkan

sebesar Rp. 46.117.974.350,00, namun di tahun 2019 penerimaannya naik drastis, yaitu Rp. 278.529.344.125,19 dari yang ditargetkan Rp. 260.777.174.153,00, dan di tahun 2020 penerimaannya kembali mengalami penurunan, yaitu Rp. 270.376.841.766,01 dari target yang ditentukan sebesar Rp. 244.181.321.476,00, namun di tahun 2021 penerimanya kembali naik secara drastis, yaitu mencapai Rp. 307.683.647.484,27 dari target Rp. 265.011.926.240,00.

1.5.3. Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang keamanan, dan kepentingan umum. Pemungutan retribusi ini dilakukan sejak akhir tahun 2011, dalam perkembangannya cukup memberi banyak kontribusi terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah walaupun masih ada penerimaan yang belum mencapai target dan sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKR). Pada tahun 2021 terdapat 475 titik menara di Kabupaten Cirebon yang menjadi objek pemungutan yang terdiri dari 13 Provider, yaitu :

Tabel 2. 9
Data Jumlah Provider Wajib Retribusi Tahun 2021

No.	NAMA PROVIDER	JUMLAH MENARA
1	PT INDOSAT	18
2	PT HUTCHISON	10
3	PT PROTELINDO	138
4	PT SOLUSI TUNAS PRATAMA	47
5	PT SARANA INTI PERSADA	12
6	PT CENTRATAMA MENARA INDONESIA	22

7	PT XL AXIATA TBK	38
8	PT TOWER BERSAMA GROUP	89
9	PT SMARTFREN	1
10	PT PERSADA SOKATAMA	6
11	PT TELKOMSEL	7
12	PT DAYAMITRA	56
13	PT IBS	31
JUMLAH		475

Sumber : DISKOMINFO Kabupaten Cirebon

Penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu empat tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami berbagai perkembangan dari kenaikan sampai dengan penurunan penerimaan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 10
Target dan Realisasi Pendapatan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA. 2018 s/d 2021

No.	TAHUN	TARGET	REALISASI	PAD	%
1	2018	1.800.000.000,00	2.142.353.625,00	584.810.843.481,60	0,36%
2	2019	1.500.000.000,00	1.749.111.750,00	727.798.823.861,38	0,24%
3	2020	1.800.088.450,00	2.401.254.375,00	733.241.269.372,02	0,33%
4	2021	1.800.088.450,00	2.479.782.525,00	846.456.257.038,54	0,29%

Sumber : DISKOMINFO Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 mengalami penurunan penerimaan, dari yang sebelumnya di tahun 2018 sebesar Rp. 2.142.353.625,00 dari total Pendapatan Asli Daerah Rp. 584.810.843.481,60 atau 0,36% menurun menjadi Rp. 1.749.111.750,00 dari total Pendapatan Asli Daerah Rp. 727.789.823.861,38 atau 0,24% bahkan bukan hanya penerimaan yang menurun tetapi untuk target di tahun 2019 juga diturunkan dari yang sebelumnya Rp. 1.800.000.000,00 di tahun 2018 menjadi Rp. 1.500.000.000,00.